

332.607  
Mau  
a  
2007

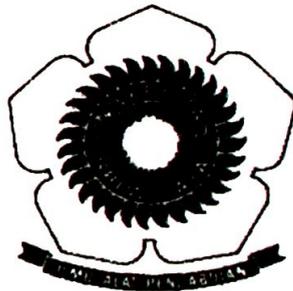
16333  
16695-

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI SEKTOR PUBLIK TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH PENDUDUK  
MISKIN DI SUMATERA SELATAN**



**Oleh :**

**A. HALIM MAULANA**

**01023120039**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
SARJANA EKONOMI  
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : A. HALIM MAULANA  
NIM : 01023120039  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH INVESTASI  
SEKTOR PUBLIK TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH  
PENDUDUK MISKIN  
DI SUMATERA SELATAN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL : 28-09-2007

KETUA PANITIA :



DR. AzWardi, M.Si  
NIP. 132050494

TANGGAL : 22-09-2007

ANGGOTA :



Drs. H.M Hibzon MB  
NIP. 131673861

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INVESTASI SEKTOR PUBLIK TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH PENDUDUK  
MISKIN DI SUMATERA SELATAN

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Komprehensif  
pada tanggal 8 Oktober 2007  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Ketua



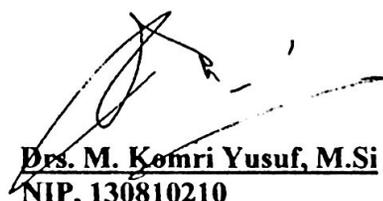
DR. Azwardi, M.Si  
NIP. 132050494

Anggota



Drs. H.M Hibzon MB  
NIP. 131673861

Anggota



Drs. M. Kemri Yusuf, M.Si  
NIP. 130810210

Mengetahui Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



DR. Taufiq Marwa, SE, M.Si  
NIP. 132050493

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul analisis pengaruh investasi sektor publik terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penelitian ini juga bertujuan agar dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau tambahan literatur bagi akademisi maupun pembaca umumnya.

Penelitian ini berisi mengenai investasi sektor publik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia yang dilihat dari indeks pembangunan manusia dan pengurangan jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Selatan. Penulis mencoba melihat dan menganalisis sampai sejauh mana investasi sektor publik yang dilakukan pemerintah berpengaruh signifikan bagi peningkatan nilai indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan serta berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan.

Penulis sadar bahwa isi dari skripsi ini belum sempurna karena masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semuanya yang membaca skripsi ini sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.

Akhir kata, mudah-mudahan isi skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua.

Palembang, 2007

Peneliti

## **TERIMA KASIH ( THANK YOU)/MOKASEEH.....**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT peneliti ucapkan karena atas berkat dan rahmat-Nya jua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa selama mengeyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya telah banyak ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan, baik dari dosen, karyawan dan juga teman-teman seperjuangan terutama di Ekonomi Pembangunan Angkatan 2002, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNSRI. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Besar, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan semuanya.
2. Kedua OIang Tuaku. Untuk Papa dan Ibuk, Ananda haturkan berjuta-juta terimakasih atas doa dan usahanya serta kasih sayang yang dicurahkan selama ini. Semoga Ananda dapat membahagiakan dan membanggakan kalian berdua Amin ya Rabbal alamin.
3. Saudara dan Saudariku, Muhamad Haris, Rahmi Yulia, Roslina semoga kita bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga Amin 3x ya Rabbal alamin.
4. DR. Syamsurijal AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNSRI sekaligus ilmu yang peneliti peroleh selama membantu di Tim Penyusun RPJM Sumsel.
5. DR. Taufik Marwa selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Drs. Suhel, M.Si selaku mantan Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan Pembimbing Skripsi kepada peneliti.
7. DR. Azwardi selaku Pembimbing Skripsi I, akan peneliti ingat semua “kata-kata” Bapak.
8. Drs. H.M. Hibzon, M.B. selaku Pembimbing Skripsi II.
9. Untuk Keluargaku, baik dari Pihak Papa maupun Pihak Ibuk.Andungqu Tercinta,tersayang, yg Cuma kenal 2 Cucu, 1.Penulis dan 2.Udo Iis.Nyai Sekip yang Tercinta.Papa Lukman Arif N Mama,Ujuk Ian yg nanyoi truss(Kapan Tamat),Om Yuli N ujuk Iba,Cik Fat Bogor N Uncu Sanul,Uncu Adil n Uncu Neli,Serta Ujuk2,uncu2,makngah,mangcik2,serta Semua

saudara2 sepupu yang kalau Penulis sebutkan nanti tidak akan cukup 1Rim Kertas,karena Buanyak niiiaaan” We Are A BIG Family”☺.

10. Buat rombongan ROMO yang berevolusi jadi ROYO dan teakhir jadi Fantastic Four Union(FFU), tobox ucapke mokaseeh nian untuk ilmu yang didapatke selama kito ngurusi HIMEPA, BEM. Adapun personel FFU, kito mulai dari yang deket rumah dulu. Ista Kesuma Lano Rendra alias Godex kawan dari SD neeee, hehehehe.Kawan lees pulo apolagi kawan ngeradax di Global...sorry bro aku duluan dak pacak dah di dealine nee oleh Boss. Kedua, Andi Amijaya alias Magon, nah dio nee yang paling keren sekaligus yang paling disegani karena rambutnya paling panjang dewek kayak preman bae. Thank you Gub untuk ilmu n carenyo. Nah yang ketigo, Diaz Almalik alias Goriee, dio nee yang paling besak dewek sekaligus sapu jagad kalo urusan makan,kayak kereta yeee hehehe. For my best freens, sorry yee tobox duluan karena tuntutan nee tapi aku yakin kalian BISOOO. ALOPYUU..eitsssss ado sikok lagee bro,budak plaju ANGGA HS namonyo. Walau Cuma stahun tapi penuh waRno..dio nee t4 kami ngumpul di seberang Palembang, oke bro moga sukses jadi popeye yooo.....
11. Buat PUTRIANA EKAPRATIWI (mylo), thanks ya untuk support, care,kasih sayang dan lovenyo.sdah jadi pacar,kawan,sahabat,adek yang baekk, n Insyaa Allah jadi.....amin hehehe☺.apolage waktu nenangke di dket MA ☺. smoga apa yang direncanake terwujud dan biso nyusul jadi SE amin. pokoke saya siap membantu hehehe....
12. Buat, Bang Bobby Malpar Paranda Endey thank yu bang untuk ilmunya skaligus dah jadi dosen, bapak,kakak,dan juga dah jadi Pembimbing Skripsi, sorry bos bisonyo jadi PS 3 karena S.K.nyo makitu agek aku buatke lagee S.K yang baru dengan komposisi DR. Bobby MP Endey sebagai PS I, Drs. H.M. Hibzon sebagai PS II, dan DR. Az Wardi sebagai PS III... hehehe☺. oi ini karya ilmiah jadi dak boleh macem2 hehehe.....
13. Buat teman-teman di EP 02, asma,aning,lia,eva,fivi,umi,dianDP,dian LB,lian,evi,dora,rizki,novi,ana,norma,saridewi,astariza”mama”sari,sutriani,do ro,roy,ical,rawal,barnas,dani,septia,listia,parulian,albeli,andrew,ruli,herta,tedi,

ariyadi,robert,habib,beni,bobjoe,sigit,mitha,ajib,beni,fifin"anca",dan semua teman2 yang ado di EP'02 dll.

14. Untuk kakak tingkat dan ayuk tingkat yang dah mau jadi My senior. oke dimulai dari EP'00, Bang Norman thank you bangu ntok ilmuno waktu di BEM,B"Yopie,B"PaianChandra,B"hosea,B"nizal.manto,dian,adi,B"wisnu, B"Agus,etc. EP'01, Syamsul "Uwak" Pairuz ketua angkatan sekaligus yang dituakan,Mba Nuke yang telah menganggap Kyu sebagai best junior,thanks ya mbak.Rachmat"Unto",Gita Bebek,Om'Joni,Mazhar" TJ,Heru"Kecek(Mokaseh Yai,DahNunguiKomPre),Evan,Todes,Isa22Nyo,etc.EP'03,Asep,aang,ajie,fajar,inge,sisti,Ruth"Huges,Vika,Feit,Ook,reni,Etc.EP'04,Ade,Wiko,Eko"bob,mardi,agus,amel,vina,novi,Etc.EP'05,Dirta"Nobon,Hendra,joni,Sandi,rahmat,etc.Serta adek2 di EP'06,07 BRAVO EP.
15. Untuk Semua karyawan yang ada di FE UNSRI,terutama Bu Aslawati,Bu Semi,Bu Santi,Bu Santi,P'Mulyadi,P'Fahrudin,P'Nur,Yu' Ita,serta semuanya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu,terima kasih atas bantuan yang selama ini Penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di FE UNSRI.
16. UntukAam,Alam,Jabrik,Dimas"Alf",Nandar,Vj,Adam,Aan,Coli,Rahmat,Fajri, Hariyadi,Ajeng,Rika,Ririn,Irma,Tika,Atika,Rahmi,Anggi,Febi,Ecit,Dudung,Resi,OpieNRifki,Bily,Jimmy,Deardo,Son,dan semua teman2 di Smu 5 PLG,dari kelas 1.4,2.6,IPS3.Insya Allah I'am still Remember all of U.
17. Untuk semua yang telah banyak membantu penulis, yang mungkin terlupakan. Tiada maksud untuk lupa,tapi Penulis juga manusia.Khilaf dan kealpan merupakan sifat manusia maka Penulis haturkan maaf yang sebesar-besarnya serta kepada ALLAH SWT penulis minta Ampun. WASSALAM.

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	15
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	20
2.3. Kerangka pemikiran.....	24
2.4. Hipotesis.....	25
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Ruang lingkup.....	26
3.2. Data dan Sumber Data.....	26
3.3. Teknik Analisis.....	26
3.4. Batasan Variabel .....	28



## **BAB IV. GAMBARAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN**

4.1. Kondisi Umum Wilayah, Administrasi dan Pemerintahan.....	30
4.2. Perkembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	31
4.3. Keadaan Perekonomian Propinsi Sumatera Selatan	
4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	39
4.3.2. PDRB per Kapita Propinsi Sumatera Selatan.....	40
4.4. Gambaran Umum Variabel Penelitian	
4.4.1. Perkembangan Investasi Sektor Publik di Sumatera Selatan.....	42
4.4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan.....	47
4.4.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan.....	51

## **BAB V. PEMBAHASAN**

5.1. Analisis Pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten kota di Propinsi Sumatera Selatan.....	59
5.2. Analisis Pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten kota di Propinsi Sumatera Selatan.....	62
5.3. Pengujian Ekonometrika	
5.3.1. Uji Heterokedastisitas.....	65
5.3.2. Uji Gejala Multikolonieritas.....	66
5.3.3. Uji Otokorelasi.....	67

## **BAB VI. KESIMPULAN dan SARAN**

6.1. Kesimpulan.....	69
6.2. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Sektor Pengeluaran Pembangunan Pusat dan Daerah.....	6
Tabel 1.2	Angka Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menurut Propinsi, 1996-2005.....	10
Tabel 1.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara di Asia Tenggara tahun 2005.....	11
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Per Kabupaten Di Propinsi Sumatera Selatan.....	31
Tabel 4.2	Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten /Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2000-2004.....	33
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2001-2004 (Dalam %). ....	34
Tabel 4.4	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.....	36
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Lapangan Usaha Utama Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 (dalam%). ....	37
Tabel 4.6	Angka pengangguran menurut kabupaten/kota Propinsi Sumatera Selatan 2000-2004(%). ....	38
Tabel 4.7	PDRB per Kapita menurut kabupaten/kota Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dengan migas) (Rp). ....	41
Tabel 4.8	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan periode 2000-2005 (dalam Miliar Rupiah). ....	43
Tabel 4.9	Investasi sektor publik pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Periode 2000-2005.....	46
Tabel 4.10	Jumlah penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Selatan.....	50
Tabel 4.11	Angka Indeks pembangunan manusia Propinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/kota 2002-2005.....	52
Tabel 5.1	Hasil regresi pengaruh ISP terhadap IPM .....	62
Tabel 5.2.	Hasil Regresi Pengaruh ISP Terhadap Jumlah Penduduk Miskin(TK). ....	65
Tabel 5.3.	Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 5.4	Hasil Uji Otokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (D-W Test).....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse .....	18
Gambar 2.2	Skema pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap IPM dan Jumlah Penduduk.....	25
Gambar 5.1.	Uji t-statistik.....	62
Gambar 5.2.	Uji t-statistik.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Perhitungan Regresi Investasi Sektor Publik terhadap Jumlah Penduduk Miskin.....	73
Lampiran II.	Perhitungan Regresi Investasi Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	75
Lampiran III.	Panel Data Pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten kota di Sumatera Selatan.....	77
Lampiran IV.	Panel Data Pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Jumlah Penduduk Miskin menurut kabupaten kota di Sumatera Selatan.....	78

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh investasi sektor publik terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series, cross-section dengan tahun pengamatan tahun 2002, 2004, dan 2005 yang berasal dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan dan instansi yang terkait. Menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil (OLS = Ordinary Least Squares) dan pooling (panel) data.

Penelitian ini menghasilkan bahwa investasi sektor publik tidak berpengaruh bagi peningkatan indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan, sedangkan terhadap jumlah penduduk miskin, investasi sektor publik berpengaruh signifikan bagi pengurangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan. Kemudian dengan menggunakan pooling data bahwa jumlah investasi sektor publik di Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan selama periode pengamatan, begitu juga dengan indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan selama periode pengamatan. Sedangkan jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuatif selama periode pengamatan.

**Kata kunci :** investasi sektor publik, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin.

## ABSTRACT

This research aim to know and also analyse influence of public sector invesment to human development index and total poor population in South Sumatra.

Data utilized in this research are data of sekunder time series, cross-section with year of year perception 2002, 2004, and 2005 are coming from Badan Pusat Statistik Propinsi of South Sumatra and related institution. Analysing the problem of research this used by a technique analyse linear regresi modestly by smallest square method ( OLS = Ordinary Least Squares) and pooling (panel) data.

This research yield that public sector invesment do not have an effect on for improvement make an index to human being development in South Sumatra, while to total poor population, public sector invesment have an effect on signifikan for decrease total poor population in South Sumatra. Then by using pooling data that amount of public sector invesment in South Sumatra tend to to experience of improvement of during perception period, so also with index of human being development in South Sumatra also experience of improvement of during perception period. While total poor population tend to fluctuate of during perception period

Keyword : public sector invesment, human development index, total poor population.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang giatnya melaksanakan pembangunan di segala sektor. Masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mencakup semua aspek kehidupan bangsa dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan negara seperti tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan. Pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pembangunan, maka yang menjadi titik tolak pembangunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja baik itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN atau APBD sangat diperlukan dalam pembangunan, baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah

karena didalam APBN atau APBD diatur jumlah penerimaan negara dan jumlah pengeluaran negara . Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari : ( Wikipedia Indonesia : 2007).

**1. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:**

**a. Penerimaan Dalam Negeri, yang terdiri atas:**

1. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas

1. Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

2. Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif Ekspor.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:

1. Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)

2. Bagian Laba BUMN

3. PNBP lainnya

**b. Hibah**

## **2. Belanja Negara**

### **Belanja Negara terdiri atas :**

- a. Belanja pemerintah pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat mau pun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya.
- b. Belanja daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri:
  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus
  4. Dana Otonomi Khusus

### 3. Pembiayaan

#### **Pembiayaan meliputi:**

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
  1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
  2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

Penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada sisi belanja atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran yang sifatnya rutin dan biasanya digunakan habis untuk setahun. Sifatnya bukanlah untuk investasi tetapi lebih kepada operasionalisasi pemerintahan, seperti gaji pegawai, tunjangan beras, honorarium pegawai, uang lembur dan tunjangan pegawai lainnya. Kemudian Pengeluaran yang sifatnya untuk pembangunan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat tahan lama dan dilaksanakan hanya sekali dan dibagi dalam berbagai jenis proyek yang dituangkan dalam beberapa sektor pembangunan dengan tujuan sebagai investasi bagi pemerintah. Pengeluaran pembangunan digunakan untuk proyek-proyek yang bersifat publik baik berupa fisik maupun non-fisik. Pengeluaran pembangunan inilah yang dikategorikan sebagai investasi sektor publik.

Menurut Suparmoko ( 2000 : 22), pengeluaran pemerintah dapat bersifat :

1. *Exhaustive* yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain, Jadi *Exhaustive Expenditure* merupakan pengalihan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
2. *Transfer* yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (*grants*), jadi *Transfer Payments* hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain.

Pengeluaran pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai investasi sektor publik adalah pengeluaran pembangunan yang terdiri dari sejumlah sektor seperti, sektor perdagangan dan transportasi, sektor primer, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pembangunan dan lingkungan serta sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat banyak atau publik. Namun tidak seluruh sektor dalam pengeluaran pembangunan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran bidang sosial atau pembangunan manusia. Oleh karena inti dari pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan maka kedua kelompok pengeluaran pembangunan inilah yang akan penulis gunakan, karena investasi sektor publik merupakan investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak atau masyarakat publik.

Lewis dan Chakeri dalam Brata (2005:3) membagi pengeluaran pembangunan menjadi tujuh kelompok sektor, sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel 1.1. Tabel tersebut tampak sektor-sektor mana saja yang menjadi bagian dari kelompok sektor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari sektor berkode 411, 415, dan 416 sedangkan untuk Kesehatan dan Kesejahteraan adalah sektor berkode 404, 412, dan 413.

**Tabel 1.1**  
**Klasifikasi Sektor Pengeluaran Pembangunan Pusat dan Daerah**

No	Kelompok Sektor	Kode Sektor	Sektor
1	Primer	402 403	Pertanian dan kehutanan Sumber daya dan irigasi
2	Sekunder	401 407	Industri Pertambangan dan energi
3	Perdagangan dan transportasi	405 406 408	Perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah, dan koperasi Transportasi Pariwisata dan telekomunikasi daerah
4	Pendidikan dan kebudayaan	411 415 416	Pendidikan dan kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga Agama Ilmu pengetahuan dan teknologi
5	Kesehatan dan kesejahteraan	404 412 413	Tenaga kerja Kependudukan dan keluarga sejahtera Kesehatan, kesejahteraan social, peranan wanita, anak dan remaja
6	Pembangunan regional dan lingkungan	409 410 414	Pembangunan daerah dan permukiman Lingkungan hidup dan tata ruang Perumahan dan permukiman
7	Aparatur pemerintahan dan pengawasan	417 418 419 420	Hukum Aparatur pemerintah dan pengawasan Politik, penerangan dan komunikasi & media massa Keamanan dan ketertiban umum

Sumber: Brata (2005).

Investasi sektor publik merupakan pengeluaran yang sifatnya investasi, karena itu sering kali terjadi tarik menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan sosial. Di satu sisi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi karena

investor mau menginvestasikan modalnya jika tersedia infrastruktur yang memadai. Namun disisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang berhasil juga memberikan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi karena tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kata lain sesungguhnya terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia ( Ramirez, dkk: 1998).

Didalam *Indonesia Human Development Report 2004*, perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih tinggi. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan relatif rendah. Kebutuhan akan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi kian terasa sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan melorotnya pencapaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk kepada tingkat kemiskinan (Booth, 1999; Fane, 2000). Sementara itu, Lanjouw, Pradhan, Saadah, Sayed, dan Sparrow, dalam Brata (2005:2) juga mengatakan selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang mereka miliki, maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan.

Persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk pembangunan sosial tersebut juga berlaku untuk pemerintah daerah, terlebih setelah berlakunya otonomi daerah. Selama ini pengeluaran pembangunan pemerintah propinsi masih terkonsentrasi pada bidang infrastruktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi investasi sektor publik pun masih relatif rendah (Brata dan Arifin, 2003).

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesehatan serta peningkatan daya beli.

Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indeks Pembangunan manusia dikembangkan pada tahun 1990 oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, *Pertama* usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup. *Kedua*, pendidikan, yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga. *Ketiga*, standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS.

Sementara menurut Tamin (1997 : 1) ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, *Pertama*, derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*Life Expectancy Rate*). *Kedua*, pendidikan yang diukur dari angka melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah. *Ketiga*, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat.

Sampai tahun 1996, tingkat pembangunan manusia di Indonesia dinilai cukup baik seperti tampak dari berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan sampai pada membaiknya tingkat harapan hidup dan melek huruf (BPS-Bappenas-UNDP, 2001). Namun pencapaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Ditambahkan pula bahwa hal yang paling tampak dan kemudian berpengaruh kepada indeks pembangunan manusia (IPM) adalah komponen pengeluaran per kapita yaitu meningkatnya tingkat inflasi sementara upah riil merosot sehingga daya beli masyarakat terpuruk. Harga-harga kebutuhan rumah tangga meningkat drastis sedangkan pendapatan masyarakat berkurang akibat pengurangan jam kerja dan peningkatan jumlah pengangguran sehingga daya beli riil masyarakat pun anjlok dan merubah pula pola konsumsi masyarakat (Rafinus, dkk : 2000).

Indeks Pembangunan manusia mengalami penurunan di setiap propinsi di Indonesia, bahkan beberapa propinsi mengalami kemerosotan tajam sehingga IPM 1999 menjadi lebih rendah daripada IPM 1990. Komponen-komponen lain dari IPM pada umumnya masih mengalami peningkatan (Bappenas-BPS-UNDP, 2001), namun peningkatan ini menjadi tidak mampu untuk mempertahankan IPM karena tenggelam oleh tajamnya penurunan daya beli masyarakat. Kendati

demikian yang cukup menguntungkan adalah bahwa aspek pendidikan cukup tertolong oleh karena telah meningkatnya persepsi masyarakat baik kaya maupun miskin akan pentingnya pendidikan (Oey-Gardiner: 2000). Tahun 2002 IPM telah mengalami perbaikan, namun perbaikan tersebut pada umumnya belum mampu menyamai tingkat IPM tahun 1996. Hanya beberapa propinsi saja yang IPM tahun 2002 cukup mendekati IPM tahun 1996, salah satunya yaitu DKI Jakarta dan Sulawesi Utara, seperti terlihat pada Tabel 1.2

**Tabel 1. 2.**  
**Angka Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia**  
**menurut Propinsi, 1996-2005**

No	PROPINSI	1996	1999	2002	2005
1	NAD	69.4	65.3	66.0	69.0
2	SUMUT	70.5	66.6	68.8	72.0
3	SUMBAR	69.2	65.8	67.5	71,2
4	RIAU	70.6	67.3	69.1	73,6
5	JAMBI	69.3	65.4	67.1	71.0
6	SUMSEL	68.0	63.9	66.0	70,2
7	BENGKULU	68.4	64.8	66.2	71.1
8	LAMPUNG	67.6	63.0	65.8	68.8
9	DKI	76.1	72.5	75.6	76.1
10	JABAR	68.2	64.6	65.8	69.9
11	JATENG	67.0	64.6	66.3	69.8
12	DIY	71.8	68.7	70.8	73.5
13	JATIM	65.5	61.8	64.1	68.4
14	KALBAR	63.6	60.6	62.9	66.2
15	KALTENG	71.3	66.7	69.1	73.2
16	KALSEL	66.3	62.2	64.3	67.4
17	KALTIM	71.4	67.8	69.9	72.9
18	SULUT	71.8	67.1	71.3	74.2
19	SULTENG	66.2	62.9	64.4	68.5
20	SULSEL	66.0	63.6	65.3	68.1
21	SULTRA	66.4	62.8	64.1	67.5
22	BALI	70.1	65.7	67.5	69.8
23	NTB	56.7	54.2	57.8	62.4
24	NTT	60.9	60.4	60.3	63.6
25	MALUKU	68.2	67.2	66.5	69.2
26	PAPUA	60.2	58.8	60.1	62.1
27	MALUKU UTARA	-	-	65.8	67.0
28	BANTEN	-	-	66.6	68.8
29	BANGKA BELITUNG	-	-	65.4	70.7
30	GORONTALO	-	-	64.1	67.5
31	KEP. RIAU	-	-	-	72.2
32	SULBAR	-	-	-	65.7
33	IRIAN JAYA BARAT	-	-	-	64.8

Sumber: BPS-BAPENAS-UNDP, Indonesia Human Development Report, berbagai tahun.

Pada tahun 2005, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999 ( Wikipedia Indonesia : 2007). Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia (urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan Vietnam (urutan 108/0.704)

**Tabel 1.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara Asia Tenggara tahun 2005**

No	Negara	Nilai HDI/IPM	Peringkat
1	Singapura	0.907	25
2	Brunei Darussalam	0.866	33
3	Malaysia	0.796	61
4	Thailand	0.778	73
5	Filipina	0.758	84
6	Vietnam	0.704	108
7	Indonesia	0.697	110
8	Myanmar	0.578	129
9	Kamboja	0.571	130
11	Laos	0.545	133
12	Papua Nugini	0.523	137
13	Timor-Leste	0.513	140

Sumber : Human Development Report 2005

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum berjalan optimal. Ini ditandai belum terpenuhinya hak-hak dasar warga, yakni kecukupan pangan, pendidikan, lingkungan dan gaya hidup sehat. Menurut Suzeta pada pembukaan Pra kongres I Pembangunan Manusia Indonesia 2006, ini memperlihatkan lambannya proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta rendahnya kemampuan pembangunan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain terhadap Indeks Pembangunan Manusia, krisis ekonomi tahun 1997 juga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sejak tahun 1987 mesin pertumbuhan terpenting dalam ekonomi Indonesia adalah sektor industri dan jasa (Booth, 2000). Mesin pertumbuhan tersebut merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, namun krisis ekonomi menyebabkan sektor-sektor modern tersebut mengalami kemunduran dengan akibat berkurangnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran pun mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Bahkan, krisis ekonomi juga telah menyebabkan masyarakat yang sebelum krisis bekerja di sektor formal beralih ke sektor informal karena berkurangnya pangsa kerja sektor formal (Suryahadi, dkk: 2003).

Pengangguran dan lenyapnya sumber penghasilan akibat krisis disertai pula dengan naiknya harga bahan pokok. Indeks harga konsumen (IHK) pangan meningkat sekitar 160 persen antara 1996 dan 1999, sedangkan non-pangan hanya meningkat 76 persen (Balisacan, dkk : 2003). Peningkatan harga ini makin memberatkan penduduk sehingga berdampak pada meningginya tingkat kemiskinan. Pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi.

Krisis ekonomi 1997 yang terjadi di Indonesia telah membalikkan prestasi yang dicapai oleh Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Tahun 1990 jumlah penduduk miskin sekitar 27 juta jiwa atau 15 persen dari total penduduk. Pada 1996, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,5 juta jiwa atau

sekitar 11 persen. Di pengujung 1997, kita mengalami krisis yang sungguh parah yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin membengkak kembali, sehingga pada 1998 menjadi hampir 50 juta jiwa atau 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Akibat krisis 1997, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Oleh sebab itu pemerintah banyak melakukan program-program untuk mengentaskan jumlah penduduk miskin di Indonesia, melalui program jaringan pengaman sosial (JPS), bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan kompensasi dari dikurangnya subsidi terhadap bahan bakar minyak serta program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP).

Mengurangi jumlah penduduk miskin berdasarkan teori ekonomi diperlukan untuk memutus mata rantai kemiskinan yaitu dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui peningkatan keterampilan kualitas sumber daya manusia maka diharapkan produktifitas akan meningkat sehingga jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang. Pemerintah sering dihadapkan pada berbagai masalah terutama dalam hal pembiayaan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sering kali terjadi tarik menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan sosial. Berdasarkan uraian yang telah dibuat, maka penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana pengaruh dari investasi publik yang dilakukan pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin di Propinsi Sumatera Selatan.

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menambah literatur dan bahan kajian ilmu ekonomi, khususnya ekonomi keuangan daerah.

### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan atau pihak-pihak yang terkait dengan penetapan kebijakan keuangan daerah terutama dalam menetapkan kebijakan pengeluaran pembangunan di Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balisacan, A.M., E.M. Pernia, A. Asra. 2003. "Revisiting Growth and Poverty Reduction: What Do Subnational Data Show?". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (3):329-351.
- Booth, A. 1999. "Survey of Recent Development". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 35 (3): 3-38.
- Booth, A. 2000. "Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36 (1): 73-104.
- BPS-Bappenas-UNDP. 2001. Indonesia Human Development Report 2001.
- BPS-Bappenas-UNDP. 2004. Indonesia Human Development Report 2004.
- BPS. 2004. *Situasi ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Selatan 2004*.
- Bakrie, Aburizal. 2006. *65 Persen APBN untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Disampaikan pada saat pidato pembukaan Pra-Kongres III Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006 di Palembang, Sumatera Selatan.
- Brata, A. G. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian - Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Heriawan, Rusman. 2006. *Data BPS : Penduduk Miskin Bertambah*. Di sampaikan Jakarta, 1 September 2006.
- Human Development Report. 2005.
- Isdijoso, Brahmantio dan Tri Wibowo. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan Di Kota Surakarta)*. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 6, No. 1. Maret 2002.

- Kuswardani. Kamis 23 Pebruari 2006. *41, 17 Persen Warga Sumsel Miskin*. Kompas, liputan khusus.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi ketiga. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lanjauw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow. 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. December 2001.
- Lewis, Blane D. dan J. Chakeri. 2004. "Central Government Spending In the Regions Post- Decentralisation". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 40 (3): 379-394.
- Nurulpaik, Iik, Senin, 05 April 2004, Pendidikan Sebagai Investasi, *Pikiran Rakyat*.
- Musgrave, Richard A. 1959. *The Theory of Public Finance*. International Student Edition. Kogakusha : McGraw Hill.
- Oates, Wallace E. 2006. *On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization*.
- Oey-Gardiner, M. 2000. "The Value of Education and The Indonesian Economic Crisis". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 48 (2): 143-173.
- Rafinus, B. H., R. Lukman, dan K. Djaja. 2000. "Tinjauan Triwulan Perekonomian Indonesia", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 48 (3): 189-214.
- Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. "*Economic Growth and Human Capital*". QEH Working Paper No. 18.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, *RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2009*.
- Remi, S.S. 20 Nopember 2004. *Antara Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia*. Pikiran Rakyat.
- Ruliansyah, Ahmad. 2007. *Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi.
- Suara Karya. 6 November , 2006. *Pemrov Sumatera Selatan Berjibaku Perangi Kemiskinan Berlari Mengejar Ketertinggalan*, liputan khusus.
- Sugita, Norman, 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Kabupaten Musi Rawas*, Skripsi.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Suryahadi, A., W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto. 2003. "Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (1): 29-50.
- Suzeta, Paskah. 2006. *Pembangunan Manusia Indonesia Belum Optimal*. Disampaikan pada saat Pidato Pembukaan pada acara Pra Kongres I Pembangunan Manusia Indonesia 2006, Jakarta, 21 Maret 2006.
- Tamin, Faisal. 1997. *IPM dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Pembangunan Daerah, Depdagri, Edisi April - Juni 1997.
- Wikipedia Indonesia. 2007. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Wikipedia Foundation, Inc.